

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh Pihak Peminjam (Debitur) kepada Pihak Pemberi Pinjaman (Kreditur). Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada Bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau Undang-Undang. Kreditur adalah pihak Bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang.² Jaminan utang merupakan pemberian keyakinan kepada pihak Kreditur atas pembayaran utang yang telah diberikannya kepada Debitur, di mana hal ini

¹ Penjelasan umum dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

² Riduan Tobink, Bil Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003), h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang-piutang. *Accessoir* artinya perjanjian jaminan bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.³

Salah satu jaminan yang sering dijaminakan pada Bank adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada dan dapat dialihkan.⁴ Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah Jaminan Fidusia.

Latar belakang lahirnya fidusia adalah adanya kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak akan tetapi benda bergerak yang dijaminakan tersebut bisa dikuasai Debitur karena diperlukan sehari-hari untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-hari. Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada yurisprudensi karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.⁵

Undang-Undang yang mengatur pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak adalah Gadai yang diatur dalam buku II Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2013), h. 8

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 146

⁵ *Ibid.*, h. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila mencari pinjaman atau kredit dengan menggunakan jaminan gadai akan terbentur pada syarat *In Bezit Stelling* yaitu salah satu syarat dalam gadai yang mensyaratkan bahwa benda bergerak yang menjadi jaminan harus ditarik/berada dalam kekuasaan pemegang gadai.⁶

Syarat *In Bezit Stelling* tersebut dirasakan sangat berat oleh pemohon kredit dengan jaminan benda bergerak karena benda yang dijaminakan itu justru sangat diperlukan untuk menjalankan usaha atau kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan demikian dan untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan masyarakat maka yurisprudensi memungkinkan adanya lembaga Jaminan Fidusia.⁷

Mengingat kebutuhan yang cukup besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana dan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang akan memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan diperlukan adanya peraturan yang lengkap mengenai fidusia, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia.⁸

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengertian mengenai Fidusia dan Jaminan Fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid.*, h. 204

⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁰ Dari pengertian tersebut maka unsur atau elemen pokok Jaminan Fidusia yaitu :

- a. Jaminan Fidusia adalah agunan untuk pelunasan utang.
- b. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu.
- c. Obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan Pemberi Fidusia.
- d. Jaminan Fidusia memberikan *hak preferent* atau hak diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur lain.
- e. Hak kepemilikan atas benda jaminan berpindah kepada Kreditur atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.¹¹

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹¹ Sutarno, *op.cit.*, h. 206

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana perjanjian jaminan utang lainnya, seperti Gadai, Hipotik, atau Hak Tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan). Maksudnya adalah Jaminan Fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan mengikuti/membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang).¹²

Sifat *accessoir* dari Jaminan Fidusia ini berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”¹³

Awalnya dibuat perjanjian pokok sebagai perjanjian utang piutang antara Kreditur dan Debitur, kemudian objek Jaminan Fidusia diikat dalam sebuah perjanjian yang disebut Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”¹⁴

Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.¹⁵ Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut guna memberikan kepastian hukum

¹² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 19

¹³ Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 142

¹⁵ Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada para pihak yang berkepentingan.¹⁶ Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.¹⁷ Pernyataan tersebut memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia (Debitur) dan Penerima Fidusia (Kreditur).
- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang memuat Akta Jaminan Fidusia.
- c. Data Perjanjian Pokok yang dijamin fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan, dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.¹⁸

Pendaftaran merupakan hal wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia dinyatakan lahir pada tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.¹⁹ Ini berarti tiada Jaminan Fidusia tanpa dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁷ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁸ Gunawan, *loc.cit.*

¹⁹ Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran fidusia maka akan memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hari dan tanggal lahirnya Jaminan Fidusia ini sangat penting karena menandai atau membuktikan lahirnya hak preferent atau hak didahulukan bagi Kreditur sebagai Penerima Fidusia sehingga Kreditur yang menerima fidusia memiliki kedudukan yang diutamakan atas Jaminan Fidusia.²⁰

Sebagai bukti bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia telah memuat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran,²¹ kemudian Kreditur sebagai Penerima Fidusia akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut yang sifatnya mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekutorial).²²

Selain itu pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hal ini menegaskan bahwa objek yang sudah dibebankan dengan perjanjian Jaminan Fidusia tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran merupakan perbuatan hukum yang sia-sia.²³

²⁰ Sutarno, *op.cit.*, h. 220

²¹ Pasal 14 ayat (1) Undan-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²² Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, *op.cit.*, h. 126

²³ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2006), h. 213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, mengubah tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia yang mulanya dilakukan secara manual pada Kantor Pendaftaran Fidusia, kini sudah dilakukan secara elektronik.

Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik adalah pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemohon (Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya) dengan mengisi aplikasi secara elektronik.²⁴

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik memudahkan bagi pihak Penerima Fidusia (Kreditur) untuk mendaftarkan Jaminan Fidusianya, selain itu juga pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik lebih efisien dibandingkan pendaftaran Jaminan Fidusia manual karena Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya tidak perlu mendatangi langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berlokasi di Ibukota Propinsi dengan melampirkan Akta Jaminan Fidusia serta Surat Kuasa jika pendaftaran dilakukan melalui kuasanya untuk mendaftarkan Jaminan Fidusianya, Penerima Fidusia (Kreditur) cukup mendaftarkan Jaminan Fidusia melalui Notaris untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara online. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sejak tahun 2013, hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran, perubahan dan penghapusan Jaminan Fidusia tidak lagi di Kantor

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendaftaran Fidusia namun dilakukan secara sistem elektronik dengan mengakses www.fidusia.ahu.go.id.²⁵

Jika dilihat pada prakteknya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau online lebih banyak dilakukan melalui perantara Notaris di kantor Notaris karena Notaris yang mempunyai user name dan password ketika mengakses sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Username dan password tersebut diberikan kepada Notaris oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum agar dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara sistem online.

Pendaftaran fidusia seharusnya diakhiri dengan Penghapusan Jaminan Fidusia atau lebih dikenal dalam prakteknya dengan sebutan Roya Fidusia. Hal ini berguna untuk mengembalikan hak Pemberi Fidusia atas objek Jaminan Fidusia yang sebelumnya diserahkan secara kepercayaan kepada Penerima Fidusia.²⁶

Yang dimaksud dengan hapusnya Jaminan Fidusia adalah tidak berlakunya lagi Jaminan Fidusia.²⁷ Mengenai hapusnya Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan hal-hal yang menyebabkan hapusnya Jaminan Fidusia di antaranya:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau

²⁵ <http://www.cicajoli.com/2016/06/fidusia-dan-cara-pendaftaran-online.html>, terakhir diakses tanggal 02 Mei 2017, jam 22.15 WIB

²⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, h. 137

²⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.²⁸

Dengan hapusnya Jaminan Fidusia seperti tersebut di atas, maka menurut Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Dengan adanya Surat Pernyataan dari Kreditur, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi.²⁹

Sejak April tahun 2015 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia. Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tersebut, salah satunya yaitu adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 menyebutkan: “Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia. Berdasarkan pemberitahuan penghapusan tersebut, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar

²⁸ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁹ Pasal 26 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.³⁰

Jika Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia, maka Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.³¹ Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang yang namanya fidusia ulang sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”

Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia yang dilakukan atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia sebelumnya. Artinya, jika ditinjau dari Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut di atas pada saat objek yang sama kembali difidusiakan oleh Pemberi Fidusia padahal belum dilakukan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia, maka telah terjadi fidusia ulang.³²

Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena benda yang telah dibebani fidusia bukan milik Pemberi Fidusia tetapi hak kepemilikannya telah beralih kepada Kreditur. Pemberi Fidusia baru bisa mengfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut diroya atau dihapus dari pendaftaran fidusia.

³⁰ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

³¹ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

³² Opia Rendra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia Ulang Objek Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”, Skripsi, JOM Fakultas Hukum Volume II No. 2, Universitas Negeri Riau, Pekanbaru, 2015, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila terjadi suatu benda yang sama dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan (hak preferent) diberikan kepada Kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.³³

Dilakukannya penghapusan (roya) fidusia menandakan objek tersebut sudah terbebas dari Jaminan Fidusia dan dapat dijamin kembali sebagai objek jaminan fidusia. Jika objek jaminan tersebut tetap didaftarkan padahal belum dilakukan penghapusan (roya) fidusia maka dalam hal ini Pemberi Fidusia telah melakukan fidusia ulang. Jadi tujuan penghapusan (roya) fidusia adalah untuk membebaskan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bebas dari Jaminan Fidusia.³⁴

Kenyataannya dalam praktek di lapangan di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru belum sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku khususnya mengenai penghapusan (roya) Jaminan Fidusia.

Mengenai pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia oleh PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat dari data yang diperoleh sebagai berikut :

³³ Sutarno, *op.cit.*, h. 218

³⁴ *Ibid*, h. 224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia oleh
PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru

No.	Tahun	Pendaftaran	Pelunasan	Penghapusan
1	2015	4	4	1
2	2016	35	35	1

Sumber: *Data diolah Tahun 2015 - Tahun 2016 dari PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.*

Berdasarkan tabel I.1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah fidusia yang pernah dilakukan penghapusan (roya) fidusia hanya berjumlah 2 (dua) fidusia. Menurut penjelasan *Penaksir* PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru menyatakan “Benda yang sering dijadikan objek Jaminan Fidusia kepada pegadaian yaitu kendaraan bermotor. Untuk pendaftaran Jaminan Fidusia didaftarkan oleh Notaris rekanan Pegadaian dengan melampirkan Surat Kuasa dari Pegadaian kepada Noatris untuk mendaftarkan fidusia, dan untuk mengenai penghapusan (roya) Jaminan Fidusia selama ini baru 2 (dua) fidusia yang pernah dilakukan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia, selebihnya setiap hutang Nasabah telah lunas pihak Pegadaian tidak pernah melaporkan hapusnya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk melakukan penghapusan (roya) fidusia.³⁵

Pihak Pegadaian hanya mengembalikan bukti hak kepemilikan terhadap objek jaminan (BPKB) yang disertai dengan surat keterangan pelunasan, akan tetapi tidak diberikan Surat Keterangan Penghapusan Jaminan

³⁵ Ibu Yuria Ariani, (*Penaksir* PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru), wawancara, Pekanbaru, 3 Februari 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fidusia, dan pihak pegadaian tidak pernah memberitahukan kepada Nasabah mengenai adanya keharusan untuk menghapus (roya) jaminan fidusia.³⁶

Dengan demikian pihak Pegadaian hanya mengembalikan objek jaminan dalam status masih terdaftar, hal ini bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Jaminan Fidusia hapus maka Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya wajib memberitahukan kepada menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.”

Selama Penerima Fidusia belum memberitahukan terkait penghapusan jaminan fidusia dan belum diterbitkannya keterangan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi, maka benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia belum hapus dan tetap melekat sebagai jaminan hutang.³⁷

Meskipun di dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dengan tegas menyebutkan bahwa: jika Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia maka Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali”, namun justru dalam prakteknya di PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Subrantas Pekanbaru pernah mendaftarkan kembali fidusia dengan objek yang sama di mana Sertifikat Jaminan Fidusia yang lama belum dilakukan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia.

³⁶ Ibu Yuria Ariani, (*Penaksir* PT. Pegadaian Syari’ah Cabang Subrantas Pekanbaru), wawancara, Pekanbaru, 3 Februari 2018.

³⁷ Sutarno, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penjelasan *Pimpinan Cabang* PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru mengatakan: "Pegadaian pernah ketika hendak melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia lagi dengan objek yang sama tetapi Sertifikat Jaminan Fidusia belum kami lakukan roya fidusia masih tetap diterima dan masih bisa didaftarkan kembali pada Kantor Pendaftaran Fidusia di mana didaftarkannya melalui Notaris rekanan Pegadaian."³⁸

Hal tersebut jelas mengakibatkan yang namanya fidusia ulang dan ini bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa: "Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar."

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia dengan judul **"PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) JAMINAN FIDUSIA DALAM SISTEM FIDUSIA ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 (Di PT. PEGADAIAN SYARI'AH CABANG SUBRANTAS PEKANBARU)."**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik persoalan, maka penulis akan membatasi permasalahan ini yakni berfokuskan kepadapermasalahan pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia dalam

³⁸ Ibu Netti Yusda, (*Pimpinan Cabang* PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru), wawancara, Pekanbaru, 3 Februari 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem fidusia online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia setelah pemberlakuan sistem fidusia online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kendala pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia setelah pemberlakuan sistem fidusia online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kendala pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia setelah pemberlakuan sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fidusia online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.

- b. Untuk menambah bahan ataupun informasi data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian terhadap permasalahan sama.
- c. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1/Strata Satu) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Guna mendukung suksesnya penelitian ini, baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahannya yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka penulis telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan atau kenyataan di dalam masyarakat.³⁹ Penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian hukum sosiologis ini penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dan mengamati secara langsung hal-hal yang

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jember: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku di lapangan. Hal ini terkait dengan bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 terhadap kewajiban penghapusan (roya) Jaminan Fidusia pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru. Apakah terdapat perbedaan antara kenyataan dengan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.

Sedangkan bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan secara jelas apa yang saat-saat ini berlaku, dan sekarang ini terjadi atau ada. Yaitu menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia setelah pemberlakuan sistem fidusia online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi kendala pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru adalah karena PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru memberikan fasilitas pembiayaan berupa fidusia, dan untuk pelaksanaan penghapusan (roya) Jaminan Fidusia pihak pegadaian tidak melaksanakan kewajiban penghapusan (roya) Jaminan Fidusia.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁴⁰

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁴¹ Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya kerana kesimpulan dalam penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru (1 orang).
- b. Pegawai bagian pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru (4 orang)

⁴⁰ *Ibid*, h.118

⁴¹ *Ibid*.h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Nasabah yang melakukan pembiayaan Fidusia dan telah didaftar fidusianya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru (39 Nasabah).

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penggunaan teknik sampel ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, sampel yang akan diambil dalam teknik ini yaitu :

- a. 1 (satu) orang Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru (100% dari populasi)
- b. 2 (dua) orang Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru (50% dari populasi)
- c. 15 (lima belas) orang nasabah (38% dari populasi)

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru	1	1	100%
2	Pegawai pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru	4	2	50%
3	Nasabah yang melakukan pembiayaan Fidusia dan telah didaftar fidusianya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016	39	15	38%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan, atau kepastian sesuatu.⁴² Sumber data pada penelitian ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan penyebaran angket yang dilakukan pada informan dan narasumber oleh pebulis.⁴³ Dalam penelitian ini yang merupakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang berkaitan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan

⁴² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), h. 281

⁴³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum dari kalangan hukum dan lain-lain.⁴⁴

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, *website*, dan *Ebook*.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara dan tahapan sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dilingkungan kerja PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan peneliti untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara tanya langsung secara tatap muka (*face to face*).⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya Pimpinan Cabang dan 2 (dua) pegawai bagian pembiayaan di antaranya Penaksir dan Kasir PT. Pegadaian Syari'ah Cabang

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 54

⁴⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subrantas Pekanbaru, serta responden tambahan lain untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan.

- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴⁶ Angket ini dibagikan kepada Nasabah yang melakukan pembiayaan Fidusia dan telah didaftar fidusianya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru yang telah dipilih sebagai sampel dan menjadi responden dalam penelitian ini.
- d. Studi pustaka, adalah pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas.

⁴⁶ *Ibid*, h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, maka penulis menjelaskan data tersebut dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka dalam penulisan skripsi ini penulis kelompokkan dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru, visi dan misi PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru, produk dan jasa pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru, dan struktur organisasi PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari tinjauan umum tentang jaminan fidusia yang meliputi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah dan Pengertian Fidusia, Subjek dan Objek Jaminan Fidusia, Sifat Jaminan Fidusia, Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia, Hak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, dan tinjauan umum tentang royalti fidusia yang meliputi Pengertian Royalti dan Kewajiban Penerima Fidusia Dalam Royalti atau Penghapusan Jaminan Fidusia,

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang kajian hasil penelitian data dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung yang meliputi pelaksanaan penghapusan (royalti) Jaminan Fidusia setelah pemberlakuan sistem fidusia online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 di PT. Pegadaian Syaria'ah Cabang Subrantas Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi kendala pelaksanaan penghapusan (royalti) jaminan fidusia di PT. Pegadaian Syaria'ah Cabang Subrantas Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran. yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dan bermanfaat bagi pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru.